

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (2003), pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya pada pasal 32 dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai SAP adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 yang dalam perkembangannya diatur dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini akan dievaluasi oleh pemerintah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Salah satu sumber informasi dalam penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) ini adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. (Kusumawati & Ratmono, 2017)

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang ada dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Penelitian Setiawan & Mediaty, (2017) menjelaskan bahwa pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor BPK dalam pemeriksaan LKPD. SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Sedangkan pada penelitian Fitriana et al., (2020) mengatakan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap opini LKPD. Banyaknya temuan kelemahan sistem pengendalian internal oleh BPK RI mengakibatkan rendahnya penerimaan opini WTP pada LKPD.

Menurut Fatimah et al., (2014) mengatakan bahwa kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP, apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kasus kerugian daerah/perusahaan dan penyimpangan administrasi. Sebelum auditor memberikan opini, auditor mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemeriksaannya. Bagi auditor dalam memberikan pendapatnya tidak hanya meyakini bahwa laporan keuangan dengan gambaran telah disajikan secara benar dan jujur serta sesuai dengan standar akuntansi semata tetapi juga mempertimbangkan relevansinya terhadap undang-undang.

Selain sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terdapat juga faktor lain yaitu kompetensi sumber daya manusia. Pramita Sari et al., (2015) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpengaruh signifikan positif terhadap opini disclaimer BPK. Sedangkan pada penelitian Rufaedah, (2021) menjelaskan bahwa kompetensi SDM memberi kontribusi positif terhadap Pencapaian Opini WTP namun tidak signifikan. Artinya, peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaporan keuangan memberi pengaruh terhadap meningkatnya kemungkinan LKPD KBB mencapai Opini WTP.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan tetapi masih terdapat kelemahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Tahun 2023. (www.karangasemkab.go.id)

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang masih terdapat kelemahan maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kepatuhan Peraturan Perundang Undangan dengan Judul “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN KARANGASEM”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem?

2. Apakah kepatuhan pada peraturan perundang undangan berpengaruh signifikan terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem?
4. Apakah sistem pengendalian intern, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pada peraturan perundang undangan berpengaruh terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana pada rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi pengetahuan tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Manfaat Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat membantu dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Karangasem.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan akuntansi khususnya padapemerintahan dan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya